



**Judul** : Daya tahan RI kembali diuji  
**Tanggal** : Kamis, 07 April 2022  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 11

## Daya Tahan RI Kembali Diuji

Pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun ini masih diselimiti ketidakpastian. Kenaikan inflasi juga bakal menjadi tantangan besar.

**JAKARTA, KOMPAS** — Pemulihan ekonomi Asia, termasuk Indonesia, terus membaik lantaran ditopang ekspor dan peningkatan permintaan domestik. Namun, pada tahun ini, pemulihan tersebut juga diselimiti ketidakpastian yang besar. Daya tahan RI yang cukup tinggi kembali diuji.

Dalam Asian Development Outlook 2022 yang dirilis Rabu (6/4/2022), Bank Pembangunan Asia (ADB) menyebutkan, ketidakpastian itu disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina, masih berlanjutan pandemi Covid-19, dan pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Harga-harga sejumlah komoditas juga masih bergejolak tinggi sehingga bakal membuat inflasi meningkat.

ADB memperkirakan, ekonomi Asia tumbuh 5,2 persen pada 2022 dan 5,3 persen pada 2023. Tingkat inflasi juga diproyeksikan naik menjadi 3,7 persen pada 2022, lalu turun lagi pada 2023 menjadi 3,1 persen.

Sementara ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5 persen pada 2022 dan 5,2 persen pada 2023. Tingkat inflasi di Indonesia yang pada 2021 sebesar 1,6 persen diperkirakan naik menjadi 3,6 persen pada 2022. Kemudian, pada 2023, tingkat inflasi diperkirakan turun menjadi 3 persen.

"Ekonomi memang terus memulih dari imbas pandemi. Namun, pada tahun ini, pemulihan itu diselimiti ketidakpastian yang besar. Kenaikan inflasi juga bakal menjadi tantangan," kata ekonom senior ADB untuk Indonesia, Henry Ma, dalam telekonferensi pers di Jakarta.

Menurut Henry, pemulihan ekonomi Indonesia akan terus menguat pada tahun ini. Ekspor dan peningkatan permintaan domestik akan menjadi penopangnya.

Volume ekspor diperkirakan masih tumbuh lambat. Namun, nilai ekspor akan tetap me-

ingkat tinggi akibat kenaikan harga sejumlah komoditas sehingga dapat semakin memperkuat neraca transaksi berjalan Indonesia.

Di sisi lain, kenaikan harga pangan dan energi global akan menyebabkan tingkat inflasi di dalam negeri naik. Inflasi itu akan memberikan tekanan terhadap fiskal, terutama anggaran subsidi, dan daya beli.

Namun, lanjut Henry, bisa jadi pendapatan pemerintah lebih besar atau melampaui target sebelumnya. Hal ini bisa terjadi lantaran ada peningkatan aktivitas ekonomi, perubahan kebijakan pajak yang mulai diimplementasikan tahun ini, serta keuntungan dari kenaikan harga komoditas.

"Kendati kenaikan harga pangan dan energi global berpotensi mengerek inflasi, lonjakan harga batubara, minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan nikel akan meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi bagi Indonesia," ujar Henry.

### Menjaga momentum

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKPF) Kementerian Keuangan Abdurrohman berpendapat senada. Konflik Rusia-Ukraina telah menyebabkan sejumlah harga komoditas global naik. Hal itu akan memberikan dampak positif sekaligus negatif bagi Indonesia.

Dengan kenaikan harga komoditas global itu, pendapatan Indonesia bisa meningkat. Di sisi lain, kenaikan harga tersebut ditransmisikan pada kenaikan harga di dalam negeri sehingga berpotensi mengerek tingkat inflasi. Pemerintah dan Bank Indonesia menargetkan inflasi pada 2022 di kisaran 2 persen hingga 4 persen.

Oleh karena itu, lanjut Abdurrohman, pemerintah berupaya mengeluarkan kebijakan yang dapat menyeimbangkan fenomena tersebut. Kebijakan itu, antara lain, adalah peman-

faatan pajak nonmigas dari sektor komoditas yang harganya naik dan perlindungan sosial.

"Defisit anggaran diperkirakan masih tinggi dengan batas maksimal 3 persen. Itu berarti pemerintah tetap mendukung pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat. Kami juga optimistis ekonomi Indonesia tahun ini akan tumbuh sesuai target, yakni di kisaran 4,8 persen hingga 5,5 persen dengan titik tengah 5,2 persen," ujarnya.

Selasa lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan harga komoditas, seperti CPO, batubara, nikel, dan minyak mentah, yang luar biasa turut menambah penerimaan negara. Di sisi lain, rambatan kenaikan harga itu akan dirasakan oleh masyarakat.

"Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan mengalokasikan penerimaan itu secara tepat dengan melihat secara detail harga pangan dan energi serta pilihan-pilihan kebijakan yang bisa diambil. Menjaga daya beli masyarakat, momentum ekonomi, serta APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah tiga langkah yang akan diupayakan pemerintah pada tahun ini," ujar Abdurrohman.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerimaan pajak negara per Februari 2022 mencapai Rp 199,44 triliun atau tumbuh 36,5 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Realisasi penerimaan pajak itu baru sebesar 15,8 persen dari target APBN 2022 yang sebesar Rp 1.265 triliun.

Realisasi penerimaan pajak terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas, yakni Rp 110,2 triliun atau 17,4 persen dari target. Kemudian, realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) senilai total Rp 74,2 triliun atau 13,4 persen dari target. (HEN)